

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT ATAS
PENDELEGASIAN TINDAKAN MEDIS DARI DOKTER DI RUMAH
SAKIT RK. CHARITAS PALEMBANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASKASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT ATAS
PENDELEGASIAN TINDAKAN MEDIS DARI DOKTER DI RUMAH
SAKIT RK. CHARITAS PALEMBANG

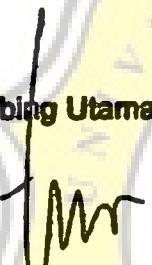
Diajukan Oleh

Marta Bengang

NIM: 08.93.0040

Telah disetujui Oleh

Pembimbing Utama:


Dr. dr. Tri Wahyu Mumi, SpBTKV, MH.Kes Tanggal : 16 Oktober 2010

Pembimbing Pendamping:



Dr. Natasya Yunita S., SH., MH.

Tanggal : 16 Oktober 2010

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT ATAS
PENDELEGASIAN TINDAKAN MEDIS DARI DOKTER DI RUMAH
SAKIT RK. CHARITAS PALEMBANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Marla Bengang

NIM: 08.93.0040

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 30 Oktober 2010

Pembimbing Utama:

Dr. dr. Tri Wahyu Murni, SpBTKV, MH.Kes

Susunan Dewan Pengaji

Anggota Tim Pengaji Lain

Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN.

Pembimbing Pendamping:

Dr. Natasya Yunita S., SH., MH.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal 08 November 2010

PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM
Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN
Ketua Program Studi, Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT ATAS PENDELEGASIAN TINDAKAN MEDIS DARI DOKTER DI RUMAH SAKIT RK. CHARITAS PALEMBANG**".

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Kesehatan (MHKes) dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga memungkinkan penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Dr. dr. Tri Wahyu Mumi, SpBTKV, MH.Kes, selaku pembimbing utama dalam penulisan tesis yang dengan kesabaran dan kepercayaannya membimbing penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Natasya Yunita S., SH., MH, selaku pembimbing pendamping dalam penulisan tesis yang dengan kesabaran dan kepercayaannya membimbing penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. A. Widanti S, SH, CN, selaku anggota tim penguji.
4. Segenap Bapak Ibu dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata, atas ilmu dan bimbingan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Pimpinan Kongregasi Santo Fransiskus Charitas dan Para Suster Santo Fransiskus Charitas yang selalu memberikan dukungan dan doa.
6. Direktur dan seluruh Staf Rumah Sakit RK Charitas Palembang yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna baik mengenai materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat.



DAFTAR ISI

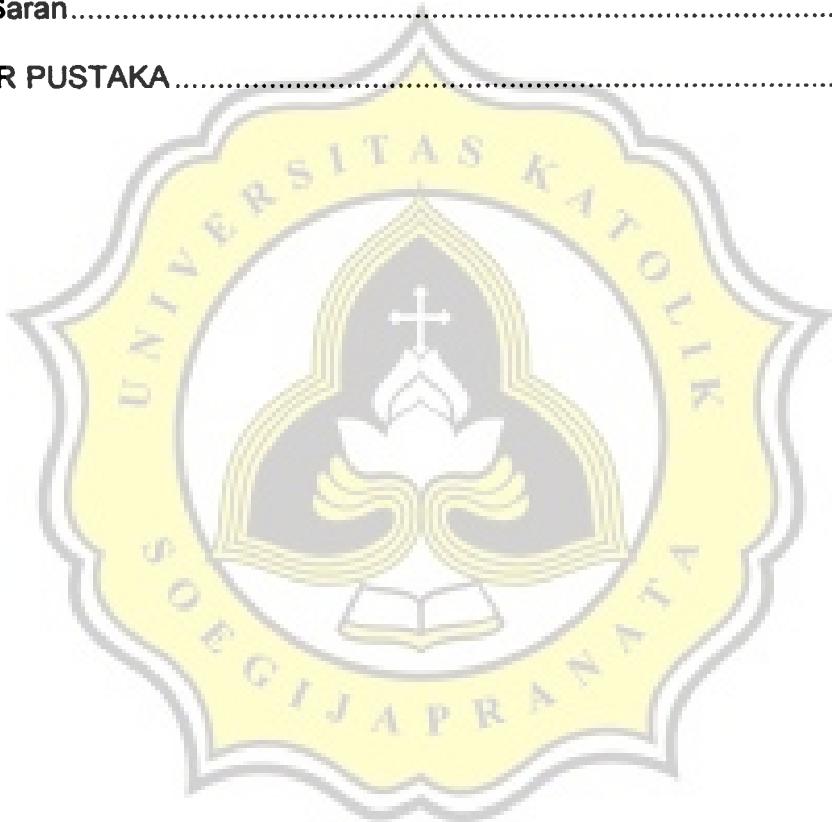
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Pernyataan.....	ix
Abstrak.....	x
Abstrac.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Penyajian Thesis	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Hukum Positif Indonesia	21
a. Perlindungan Hukum.....	21
b. Tenaga Kesehatan.....	23
c. Perawat dan Keperawatan.....	24
d. Fungsi dan Peran Perawat.....	27

1. Fungsi Perawat.....	27
2. Peran Perawat.....	32
e. Hak dan Kewajiban Perawat	34
f. Lafal Sumpah Perawat.....	45
g. Standar Kompetensi Perawat.....	51
h. Klasifikasi Tenaga Perawat Berdasarkan Pendidikan	53
i. Tanggung Jawab Hukum Perawat Dalam Praktik	58
j. Tindakan Medis Perawat di Rumah Sakit	65
k. Tenaga Dokter	66
l. Pelayanan Rumah Sakit	71
B. Pendeklegasian Tindakan Medis Pada Perawat.....	81
a. Konsep Pendeklegasian Tindakan Medis	81
1. Konsep Delegasi.....	81
2. Definisi Pendeklegasian	83
3. Dasar Pendeklegasian	87
4. Sifat Delegasi.....	88
5. Sikap Terhadap Delegasi.....	89
6. Faktor Penting dalam Pendeklegasian	89
7. Sikap Pemimpin Terhadap Pendeklegasian	90
8. Dasar Hukum Pendeklegasian	91
BAB III PEMBAHASAN	
A. Gambaran tentang Rumah Sakit	96
B. Pembahasan	97

1. Tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan perawat yang didelegasikan....	97
2. Rumah Sakit memberikan perlindungan hukum kepada perawat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Marta Begang, Peserta Program

Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 08.93.0040,

Menyatakan :

- 1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.**
- 2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2010

Marta Begang

ABSTRAK

Organisasi Rumah sakit merupakan organisasi yang padat tenaga kerja dengan variasi status dan status dan keahlian sangat luas. Salah satu karakteristik yang membuat rumah sakit sangat berbeda dengan organisasi yang lain. Dengan padatnya tenaga kerja dan variasi fungsi dengan tugas yang sangat luas membawa konsekuensi kompleksnya masalah di rumah sakit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tindakan medis yang didelegasikan oleh dokter di rumah sakit.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji secara mendalam bahan hukum baik yang berupa undang-undang maupun aturan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang didelegasikan dokter kepada perawat semuanya belum sepadan sesuai dengan peran dan fungsi perawat khususnya fungsi dependen serta kewenangan perawat. Rumah Sakit mencoba mengakomodasikan kepentingan perawat untuk mendapat perlindungan hukum dengan memakai instrumen aturan perundang-undangan ternyata belum juga menguntungkan perawat.

Dengan diberlakukannya Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang praktik keperawatan pun ternyata belum mampu menjawab persoalan hak dan kewajiban perawat jika terjadi kesalahan dalam menjalankan tindakan medis yang didelegasikan yang mengakibatkan terjadinya malpraktek. Oleh karena itu rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan membuat tata aturan yang dapat mengikat semua pihak baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan dengan cara menyusun dan melaksanakan *hospital bylaws* dan *medical staf bylaws* berdasarkan peraturan perundangan yang diberlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Delegasi dan Kewenangan, Pemberian obat, Dokter dan Perawat

ABSTRACT

A Hospital Organization is an organization of a lot of employees with broadly various status and skills. One of the characteristics that makes hospital different from other organizations is the labor and the broadly various functions bringing to the consequences of the complex problems in the hospital.

This research aims to know and analyze the legal protection for the nurses in carrying out medical action delegated by a doctor in a hospital.

The approach used in this research is normative juridical by deeply reviewing legal material in the form of laws and other regulations.

This result of the research shows that medical action delegated by a doctor to the nurses is not suitable to the role and function of the nurses, especially dependent function and their authority. Hospital tries to accommodate the nurses' prominent to get legal protection by using the instrument of the regulation but unfortunately they have not been profitable for the nurses.

The implementation of The decree of Republic Indonesia Ministry of Health Number HK.02.02/Menkes/148/I/2010 about Nurses Practices has not been able to answer the questions on the nurses' rights and obligation if there is a mistake in carrying out medical action delegated by a doctor which causes a malpractice. Therefore, a hospital has to protect its labor by making regulations which cover both the hospital and its labor, so it has to arrange and carry out hospital by laws and medical staff by laws based on the regulations applied in Indonesia

Keyword : Delegation and Authority, Drug Administration, Doctor and Nurse

